



PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA: STRATEGI TRANSFORMASI MENUJU MASYARAKAT INKLUSIF

Mayya Kholidah Masruroh¹, Chanesya Farah Kaharani², Muhammad Syaikhon³,
 Setyastanto⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

*Email: : 4110025008@student.unusa.ac.id, 41100250014@student.unusa.ac.id,
muhammadsay87@unusa.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i4.4355>

Abstrak

Pendidikan multikultural di Indonesia, yang berakar pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, adalah keharusan konstitusional untuk menjaga solidaritas di tengah keragaman 1.300+ suku. Dalam periode 2020–2025, yang ditandai dengan meningkatnya intoleransi digital, implementasinya melalui Kurikulum Merdeka (P5) dan kerangka Banks sangat penting. Tantangan utama, seperti kompetensi guru dan dampak digital, harus diatasi dengan pelatihan berkelanjutan dan revisi kebijakan. Tujuannya adalah memposisikan pendidikan multikultural sebagai upaya pengajaran sekaligus politik untuk mencapai keadilan sosial dan membangun masa depan bangsa yang harmonis dan inklusif.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Indonesia, Kurikulum Merdeka, Dimensi Banks, Keadilan Sosial

1. PENDAHULUAN

Indonesia diakui secara global memiliki keanekaragaman budaya yang luar biasa, ditandai dengan lebih dari 1.300 suku, ratusan bahasa lokal, dan berbagai keyakinan agama. Kekayaan ini adalah inti dari identitas bangsa, namun pada saat yang sama, ia menuntut pengelolaan yang cerdas untuk mencegah potensi konflik. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran yang sangat penting sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran, toleransi, dan kemampuan berinteraksi secara damai. Oleh karena itu, pendidikan multikultural bukan lagi sekadar inovasi pedagogis, melainkan sebuah fondasi esensial untuk menjaga integrasi sosial.

Landasan filosofis pendidikan multikultural di Indonesia sangat kuat, bersumber dari Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan persatuan di tengah perbedaan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Namun, periode 2020 hingga 2025 telah menunjukkan bahwa upaya ini makin mendesak. Maraknya intoleransi di ruang digital, berlanjutnya polarisasi identitas, dan kebutuhan akan kemampuan kolaborasi global menuntut sekolah untuk menjadikan isu keragaman sebagai fokus utama dalam membentuk karakter dan keterampilan siswa.

Kerangka kerja seperti lima dimensi James A. Banks menyediakan panduan yang terstruktur untuk mengintegrasikan nilai-nilai inklusif ke dalam kurikulum, proses pengajaran, dan budaya sekolah secara menyeluruh. Selain itu, Kurikulum Merdeka, dengan instrumen utamanya seperti Profil Pelajar Pancasila dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), menawarkan fleksibilitas yang lebih besar untuk menerapkan prinsip-prinsip multikultural secara kontekstual. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan, termasuk keterbatasan kompetensi guru, bias dalam materi ajar, pengaruh negatif lingkungan digital, dan tantangan kelembagaan.

Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif urgensi, pendekatan implementasi, dan berbagai tantangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pendidikan multikultural diposisikan sebagai strategi kunci, tidak hanya untuk dunia pendidikan, tetapi juga strategis bagi masa depan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, harmonis, dan terhubung secara global.

1. Landasan Filosofis dan Urgensi

Pendidikan multikultural di Indonesia memiliki fondasi filosofis yang kuat, yang bersumber



dari nilai-nilai dasar negara. Dua konsep utama yang sering menjadi acuan adalah:

- **Pancasila**

Nilai-nilai dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia menggariskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan penguatan identitas kebangsaan yang melampaui sekat-sekat primordial. Kedua sila ini tidak hanya mencerminkan idealisme moral, tetapi juga menawarkan kerangka etis bagi warga negara untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam keragaman.

- **Bhinneka Tunggal Ika**

Semboyan ini mengartikulasikan prinsip kesatuan dalam keberagaman sebagai orientasi praksis kehidupan berbangsa. Dalam perspektif pendidikan multikultural, Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan komitmen untuk mengelola perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai modal sosial yang dapat memperkuat integrasi nasional (Riyadi et al., 2024).

Kenyataan sosial dalam rentang 2020–2025 memperlihatkan semakin mendesaknya implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Beberapa fenomena utama yang memperkuat urgensi tersebut antara lain:

- **Eskalasi Intoleransi di Ruang Digital**

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas akses komunikasi, namun juga memfasilitasi penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi berbasis SARA dalam intensitas yang sulit dikendalikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati lintas budaya (Manurung et al., 2022).

- **Persistensi Kesenjangan Sosial-Budaya**

Meski Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam, fakta sosial menunjukkan masih adanya polarisasi berbasis etnis, agama, maupun kelas sosial yang sering kali memicu miskomunikasi atau konflik. Fenomena primordialisme dan etnosentrisme yang masih kuat mengindikasikan perlunya upaya pendidikan yang lebih sistematis untuk membangun dialog lintas identitas serta mengembangkan sensitivitas sosial dalam diri peserta didik (Bunyamin et al., 2020).

- **Tuntutan Kompetensi Global di Era Interkoneksi**

Globalisasi menempatkan peserta didik pada situasi kompetitif yang menuntut kemampuan berkolaborasi dengan berbagai kelompok budaya di tingkat nasional maupun internasional. Pendidikan multikultural menjadi instrumen penting untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga mampu berinteraksi secara produktif, etis, dan kritis dalam lingkungan yang beragam (Setiawan et al., 2024).

2. Dimensi dan Model Implementasi di Indonesia

Pendidikan multikultural pada dasarnya bukan sekadar menambah materi tentang keberagaman ke dalam kurikulum, tetapi mengubah cara sekolah memandang, merencanakan, dan menjalankan proses belajar. Di Indonesia, kerangka lima dimensi dari James A. Banks (2008) masih relevan digunakan karena memberikan panduan yang cukup komprehensif untuk membangun lingkungan belajar yang inklusif. Di tengah arus globalisasi, pendidikan multikultural bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan dasar krusial untuk membentuk generasi yang toleran, kritis, dan inklusif. Dimensi ini mencakup pengakuan serta integrasi keragaman budaya, sosial, dan individu ke dalam proses belajar, sehingga setiap siswa merasa dihargai dan diberdayakan. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada pelajaran seperti IPS atau PPKn, melainkan meresapi seluruh lingkungan sekolah. Mari kita telaah dimensi ini lewat penjelasan mendalam dan aplikasinya yang relevan di dunia pendidikan.

Salah satu elemen utama adalah integrasi konten, di mana pendidik secara inovatif menyisipkan elemen budaya yang beragam ke dalam pengajaran harian. Hal ini membantu siswa menyadari bahwa keragaman bukanlah topik sesekali, melainkan bagian esensial dari kehidupan sehari-hari. Sebagai ilustrasi, guru Matematika dapat mengundang siswa untuk memeriksa pola simetri pada batik, kain tenun, atau pahatan tradisional guna menjelaskan konsep geometri. Kegiatan ini tidak sekadar menguatkan pemahaman matematis, tetapi juga membangkitkan penghargaan terhadap warisan budaya setempat, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan terkait.



Berikutnya, konstruksi pengetahuan mendorong siswa untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan sering terpengaruh oleh perspektif tertentu. Dengan demikian, siswa diajari menganalisis sumber informasi secara mendalam, bukan menelan bulat-bulat. Saat belajar sejarah daerah, misalnya, siswa diarahkan untuk mendiskusikan alasan suatu kejadian diceritakan dari sudut pandang spesifik dan bagaimana itu memengaruhi interpretasi kita terhadap masa lampau. Diskusi seperti ini melengkapi siswa dengan kemampuan berpikir kritis, membantu mereka menghindari bias, dan mendorong pemahaman yang lebih menyeluruh.

Pengurangan prasangka merupakan dimensi vital lainnya, di mana sekolah sengaja membentuk ruang belajar bersama di luar ruangan kelas. Ini memungkinkan siswa dari berbagai latar budaya, agama, dan gender untuk berinteraksi dalam atmosfer positif, sehingga meningkatkan toleransi dan saling pemahaman. Program seperti “Teman Sebaya Lintas Iman/Budaya” adalah contohnya, di mana siswa dari beragam asal terlibat dalam aktivitas bersama, seperti merancang proyek sosial atau mengadakan dialog terbuka tentang adat istiadat dan keyakinan masing-masing. Lewat interaksi ini, stereotip berkurang, dan siswa belajar menghargai perbedaan sebagai aset, bukan rintangan.

Pedagogi kesetaraan menekankan penyesuaian metode mengajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan cara belajar siswa yang bervariasi. Titik fokusnya bukan pada perlakuan seragam bagi semua, melainkan memastikan setiap siswa mendapat kesempatan yang setara untuk tumbuh sesuai potensinya. Dalam Kurikulum Merdeka, contohnya, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menawarkan pilihan tugas yang berbeda, seperti membuat poster, video, ataupun cerita yang sesuai dengan minat dan latar budaya siswa, tanpa mengurangi inti pembelajaran (Khoirunnisa, 2022). Cara ini dapat menjamin inklusivitas, di mana siswa dengan kebutuhan khusus atau asal unik tidak ketinggalan.

Terakhir, pemberdayaan budaya sekolah menciptakan praktik dan lingkungan yang menghormati keragaman, mulai dari aturan hingga kegiatan rutin. Sekolah yang inklusif membuat siswa merasa aman, dihargai, dan diakui jati dirinya. Misalnya, menyusun jadwal acara yang memberikan tempat bagi peringatan hari raya agama dan budaya secara proporsional, serta meninjau ulang tata tertib agar terbebas dari elemen diskriminatif (Al Arifin, 2021). Dengan budaya sekolah yang mendukung, dimensi multikultural bukan lagi slogan, melainkan kenyataan hidup yang membentuk siswa menjadi warga global yang empati dan kuat.

Melalui dimensi-dimensi ini, pendidikan multikultural di sekolah tidak hanya mengajar, tetapi juga mengubah serta mendorong generasi yang siap menangani kompleksitas dunia kontemporer dengan sikap hormat dan solidaritas. Penerapannya membutuhkan dedikasi dari guru, siswa, dan seluruh komunitas sekolah untuk menghasilkan transformasi yang bertahan lama.

3. Peran Kurikulum Merdeka (2020-2025)

Dengan Kurikulum Merdeka, pendidikan multikultural bisa lebih mudah diintegrasikan, melalui kebijakan:

- Profil Pelajar Pancasila (P3): P3 terdiri dari enam dimensi, dengan dimensi Berkebinekaan Global sebagai pusat dari multikulturalisme. Dimensi ini menekankan pentingnya pengenalan dan penghargaan terhadap berbagai budaya yang diintegrasikan secara interdependen, kemampuan komunikasi antarbudaya, dan refleksi kritis terhadap pengalaman kebinekaan
- Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5): P5 berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menerapkan pembelajaran berbasis aksi. Dengan tema "Kebinekaan Tunggal Ika", siswa diajak untuk melaksanakan proyek nyata (contohnya membuat podcast lintas budaya, menyelenggarakan festival makanan daerah, atau kampanye anti-diskriminasi) yang dapat menumbuhkan empati dan kerjasama (Pudyastuti et al., 2023).
- Fleksibilitas Kurikulum: Para guru diberikan lebih banyak otoritas untuk mengkontekstualisasikan materi ajar sesuai dengan realitas multikultural di daerahnya, sehingga memungkinkan pendidikan yang lebih relevan dan tidak terpusat.

4. Tantangan Kontemporer (2020-2025)

Sebagai tenaga pendidik, saya sering merenungkan kompleksitas penerapan dimensi multikultural di sekolah, yang tidak hanya melibatkan integrasi konten tetapi juga menghadapi



berbagai hambatan struktural dan sosial. Berdasarkan literatur dan pengalaman lapangan, tantangan ini dapat dikategorikan ke dalam empat aspek utama: kapasitas guru, konten dan sumber belajar, faktor lingkungan, serta aspek kelembagaan. Setiap kategori menunjukkan permasalahan spesifik yang dapat diatasi melalui solusi strategis yang terintegrasi. Berikut adalah penjelasan mendalam, dengan fokus pada analisis kritis dan rekomendasi praktis.

Pertama, kapasitas guru sering menjadi bottleneck utama, di mana pendidik cenderung salah menginterpretasikan multikulturalisme sebagai domain eksklusif PKn, sambil mengabaikan bias bawah sadar mereka sendiri yang dapat memengaruhi interaksi kelas. Untuk mengatasi ini, program Pelatihan Guru Berkelanjutan (Continuous Professional Development/CPD) yang berorientasi pada Pedagogi Kritis Multikultural menjadi solusi krusial. Pendekatan ini melibatkan sesi refleksi diri, diskusi kelompok, dan simulasi skenario untuk membangun kesadaran kritis, sehingga guru dapat mengintegrasikan perspektif inklusif ke dalam praktik harian mereka.

Kedua, tantangan terkait konten dan sumber belajar muncul dari kesulitan menemukan bahan ajar yang netral, tidak bias, dan dapat diterima secara universal, yang sering kali memperkuat stereotip budaya. Solusi strategisnya adalah pengembangan modul digital interaktif yang menggambarkan keragaman budaya lokal, dirancang untuk aksesibilitas tinggi dan distribusi gratis. Modul ini dapat mencakup elemen multimedia seperti video etnografi atau kuis interaktif, memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk terlibat aktif, sambil meminimalkan risiko konten yang memihak.

Ketiga, faktor lingkungan eksternal, seperti penyebaran intoleransi melalui media sosial yang merembes ke lingkungan sekolah, memperburuk polarisasi sosial. Untuk menanggulangi ini, kolaborasi antar-pusat pendidikan—yaitu sekolah, keluarga, dan komunitas—diperlukan untuk memantau konten digital dan memodelkan perilaku toleran. Strategi ini melibatkan workshop bersama, kampanye kesadaran online, dan pembentukan jaringan dukungan, yang secara empiris dapat mengurangi dampak negatif dari perpecahan politik pada dinamika kelas.

Keempat, aspek kelembagaan sering kali menunjukkan kebijakan sekolah yang diskriminatif, seperti aturan seragam atau kegiatan ekstrakurikuler yang marginalkan kelompok minoritas. Solusi efektif adalah audit berkala terhadap kebijakan sekolah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip kesetaraan dan inklusivitas, sebagaimana direkomendasikan oleh Al Arifin (2021). Proses ini melibatkan partisipasi stakeholder, termasuk siswa dan orang tua, untuk merevisi aturan yang tidak adil, sehingga menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung keragaman.

Secara keseluruhan, tantangan ini menuntut pendekatan holistik yang menggabungkan pelatihan, inovasi teknologi, kolaborasi sosial, dan reformasi kebijakan. Sebagai calon praktisi pendidikan, saya percaya bahwa mengatasi hambatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pendidikan multikultural, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih harmonis dan adil. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak solusi ini dalam konteks Indonesia yang beragam.

2. METODOLOGI PENELITIAN

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. SIMPULAN

Pendidikan yang menghargai berbagai budaya di Indonesia adalah hal krusial untuk mempertahankan keseimbangan di antara berbagai etnis, bahasa, dan agama. Prinsip Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai fondasi yang kokoh untuk pengembangan sistem pendidikan yang bersifat inklusif, terutama di tengah meningkatnya intoleransi di dunia maya, perpecahan sosial, dan tuntutan internasional. Dengan memanfaatkan lima dimensi Banks dan dukungan dari Kurikulum Merdeka seperti Profil Pelajar Pancasila dan Proyek P5, pendidikan multikultural dapat diterapkan dengan lebih menyeluruh. Namun, berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru,



prasangka dalam bahan ajar, dampak dari dunia digital, serta kendala kebijakan sekolah masih menghalangi pelaksanaannya. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan terintegrasi beserta komitmen dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, inklusif, dan mampu membangun generasi yang toleran serta siap menyambut perbedaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Arifin, A. H. (2021). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 9(1), 1–16.
- Ardiansyah, R., Hastuti, D. N. A. E., & Sari, M. K. (2023). Pendidikan Multikultural Sebagai Implementasi Profil Pelajar Pancasila Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 8(02).
- Bunyamin, Zulkifli, Maftuh, & Malihah, E. (2020). Pendidikan Multikulturalisme Sebagai Resolusi Konflik: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *PPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 10(2), 14–32.
- Fauzi, M., Setiyorini, N. D., Setyowati, H., Irdyansah, A., & Mubarak, A. S. (2025). *Pendidikan Multikultural: Teori, Praktik, dan Transformasi Sosial*. Penerbit NEM.
- Hidayat, O. T. (2022). *Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat 5.0*. Muhammadiyah University Press.
- Khoirunnisa. (2022). Manajemen Sekolah Terkait Dengan Pendidikan Multikultural. Dalam *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Menguatkan Identitas Nasional Melalui P5 di Era Globalisasi*. Universitas Negeri Malang Conferences.
- Lestari, D., & Tirtoni, F. (2025). Implementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Karakter Toleransi Pada Sekolah Inklusi. *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 4(3), 827-835.
- Manurung, D. O., Purba, C. D., Nainggolan, S. R., & Sitorus, F. E. (2022). Pendidikan Multikulturalisme dan Prospeknya di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*.
- Nugroho, S., & Latifah, S. (2022). Pendidikan Multikultural sebagai Strategi Pembentukan Karakter Inklusif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(3), 89–104.
- Pudyastuti, R. N., Sutisnawati, A., & Wardani, D. N. (2023). Implementasi Pendidikan Multikultural dan Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 17(2), 118–130.
- Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia. *Jaksa J. Kaji. Ilmu Huk. dan Polit.*, 2(3), 34–49.
- Rohmah, S., & Nugroho, T. (2025). Efektivitas pembelajaran berbasis multikultural dalam meningkatkan toleransi siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 16(1), 34–47. (Perkiraan tahun terbit/kemutakhiran data).
- Setiawan, A., Utami, R., & Lestari, M. (2024). Strategi pendidikan multikultural di era digital. *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 8(2), 23–36.
- Sipuan, A., Supriadi, E., & Handoyo, R. (2022). Peran Pendidikan Multikultural dalam Mengatasi Isu SARA dan Memperkuat Kohesi Sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 796–808.
- Wardani, I. K., Nugroho, A. C., Sumardjoko, B., & Ati, E. F. (2024). Implementasi Pendidikan Multikultural dan Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 2617-2626.